

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Ed.rev., cet. 12., Djambatan, Jakarta.
- Hutagalung, Arie S., 1985, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Jaya, I Nyoman Budi, 1989, *Tinjauan Yuridis tentang Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Perangin, Effendi, 1986, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto, 1996, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Saleh, K. Wantjik, 1985, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Bandung.
- Sunindhia, Y. W. dan Ninik Widiyanti, 1988, *Pembaharuan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran)*, Bina Aksara, Jakarta.

B. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Dewi, Ariska, 2008, *Peran Kantor Pertanahan dalam Mengatasi Kepemilikan Tanah "Absentee/Guntai" di Kabupaten Banyumas*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nurhayati, 2006, *Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.



C. Internet

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, “Luas Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta (hektar), 2015”, <http://www.yogyakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/54>, diakses 2 November 2016.

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, “DIY dalam Angka 2013”, <http://www.jogjaprov.go.id/pemerintahan/kalender-kegiatan/view/luas-wilayah>, diakses 30 Januari 2017.

Sholihin, “Hak dan Kewajiban”, <http://www.hukumbosowa.web.id/blog/2016/10/29/hak-dan-kewajiban/>, diakses 8 Maret 2017.

Tunardy, Wibowo, “Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee”, <http://www.jurnalhukum.com/larangan-pemilikan-tanah-pertanian-secara-absentee/>, diakses 30 November 2016.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1934).

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174720, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674).

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2322).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 112).

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (*Absentee*) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736).

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5373).

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C).

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 115/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Keluar Tahun Anggaran 2016.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan *Absentee/Guntai*.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi *Landreform*.